

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital pada pemerintahan daerah kini menjadi salah satu agenda strategis dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan SIPD sebagai sistem utama dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta evaluasi kinerja keuangan daerah.

SIPD memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. SIPD sebagai sistem terintegrasi yang digunakan pemerintah daerah untuk mengelola proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan secara digital dan terpusat. Implementasi SIPD dinilai mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dan membantu pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat (Hardiansyah & Jaffisa 2024). SIPD mendukung efektivitas pengelolaan data keuangan daerah sehingga proses administrasi dan pelaporan menjadi lebih terintegrasi (Paat & Saleh 2023). SIPD juga dianggap mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga proses administrasi dan pelaporan dapat dilakukan

secara lebih efektif (Tanan et al. 2025). Dengan berbagai manfaat tersebut, keberhasilan implementasi SIPD menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Keberhasilan implementasi SIPD tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia serta kualitas sistem yang digunakan. Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang pada tahun 2024 tercatat sebesar 66,72, meningkat 0,53 poin atau 0,79% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 66,19. Meskipun menunjukkan tren positif, pertumbuhan IPM Kabupaten Sampang selama periode 2021-2024 masih tergolong relatif lambat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,49% per tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sampang masih menghadapi tantangan, khususnya pada aspek pendidikan dan kompetensi, yang berpotensi memengaruhi kemampuan aparatur dalam mengoperasikan serta memanfaatkan SIPD secara optimal. Oleh karena itu, Kabupaten Sampang menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi SIPD.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan *Human Capital Theory* (Becker 1964) dan *DeLone & McLean Information System Success Model* (DeLone & McLean 2003) sebagai landasan teoretis untuk menjelaskan hubungan antara faktor sumber daya manusia dan faktor teknis dalam implementasi SIPD. *Human Capital Theory* menekankan bahwa kompetensi dan tingkat pendidikan merupakan modal utama yang menentukan kemampuan individu dalam meningkatkan efektivitas kerja dan beradaptasi terhadap penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, *DeLone & McLean Information System Success Model* menjelaskan bahwa kualitas sistem merupakan determinan utama keberhasilan suatu sistem informasi, karena sistem yang andal, mudah digunakan, dan

terintegrasi akan mendukung efektivitas implementasi. Dengan demikian, kedua teori tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis berupa kualitas sistem, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia sebagai pengguna utama sistem dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah secara efektif.

Isu implementasi SIPD bukan hanya persoalan teknis di tingkat lokal, melainkan tantangan nasional yang memerlukan dukungan kebijakan, penguatan SDM, dan perbaikan infrastruktur agar benar-benar menjadi sarana mewujudkan *good governance*. Dalam praktiknya, meski SIPD telah diposisikan sebagai solusi modernisasi birokrasi, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Hasanah & Djasuli (2025) menunjukkan bahwa SIPD di BPPKAD Kabupaten Sampang memiliki keterbatasan, seperti banyaknya menu input yang membingungkan, keterlambatan penganggaran, dan terhambatnya penggajian akibat *server error* serta jaringan yang tidak stabil. Untuk memperkuat gambaran mengenai kendala implementasi SIPD secara nasional, berikut disajikan tren kendala teknis dan non teknis berdasarkan penelitian periode 2021-2025.



Gambar 1. 1 Tren Kendala Teknis dan Non Teknis SIPD di Indonesia

Grafik “Tren Kendala Teknis dan Non Teknis dalam Implementasi SIPD di Indonesia Periode 2021–2025” menunjukkan bahwa kendala dalam implementasi

SIPD terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan sistem di berbagai daerah. Pada tahun 2021, penelitian masih terbatas dan lebih banyak menyoroti kendala non teknis, seperti rendahnya pemahaman pengguna dan minimnya pelatihan. Memasuki tahun 2022-2023, kendala teknis mulai banyak ditemukan, seperti server tidak stabil, gangguan jaringan, dan keterlambatan input data. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 ketika jumlah kendala teknis dan non teknis meningkat signifikan, mencerminkan semakin kompleksnya implementasi SIPD. Pada tahun 2025, kedua jenis kendala tersebut masih mendominasi dengan proporsi yang relatif seimbang. Namun, sebagian penelitian terdahulu masih membahas kendala teknis dan non teknis secara terpisah, padahal dalam praktiknya keduanya saling berkaitan, di mana hambatan teknis sering kali diperburuk oleh keterbatasan kompetensi SDM, kurangnya pelatihan, serta rendahnya kemampuan adaptasi pengguna terhadap sistem baru.

Penelitian oleh Anggraini et al. (2023) menyatakan bahwa peningkatan kompetensi dapat meningkatkan kualitas sistem informasi dan efektivitas penggunaannya. Maharani et al. (2024) menegaskan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman dan kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap teknologi digital. Penelitian Pratiwi (2019) menyatakan bahwa kualitas sistem yang baik mampu meningkatkan efektivitas kerja pengguna melalui informasi yang akurat dan tepat waktu. Temuan dari ketiga penelitian tersebut memperkaya bukti empiris bahwa efektivitas implementasi SIPD dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor sumber daya manusia (kompetensi dan tingkat pendidikan) serta faktor teknis (kualitas sistem). Namun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan terkait pengaruh masing-masing variabel, yang

mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak selalu memberikan pengaruh yang seragam dalam setiap konteks penelitian.

Ketidakkonsistenan tersebut terlihat dari perbedaan hasil penelitian. Anggraini (2023) menemukan bahwa kompetensi pengguna, berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Temuan Madyatika (2022) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem. Pada variabel tingkat pendidikan, Pradnyani & Putra (2022) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi. Namun, penelitian Prananindya & Natalisty (2024) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas sistem. Hasil penelitian Pratiwi (2019) menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap efektivitas implementasinya. Sebaliknya, penelitian Akram et al. (2017) menemukan bahwa kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem memiliki fitur yang lengkap, andal, dan mudah digunakan, kondisi tersebut belum tentu mendorong pengguna untuk memanfaatkannya secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sistem saja tidak cukup, karena efektivitas penggunaannya juga sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi pengguna dalam memanfaatkan sistem tersebut.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait pengaruh kompetensi pengguna, tingkat pendidikan, dan kualitas sistem terhadap efektivitas implementasi SIPD. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif manajemen sumber daya manusia dan sistem informasi, dengan menekankan pentingnya kompetensi pengguna, tingkat

pendidikan, dan kualitas sistem sebagai determinan utama keberhasilan implementasi SIPD. Kompetensi pengguna yang dimaksud berasal dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis yang dimiliki pengguna dalam mengoperasikan sistem secara efektif. Tingkat pendidikan, yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal yang ditempuh pengguna, berpotensi memengaruhi kemampuan analitis, daya tangkap informasi, serta pemahaman terhadap prosedur dan logika keuangan daerah. Selain itu, kualitas sistem yang mencakup kemudahan akses, waktu respon, integrasi, dan konsistensi kinerja turut menentukan kelancaran proses akses, pemrosesan data, serta keandalan informasi yang dihasilkan oleh SIPD.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi pengguna, tingkat pendidikan, serta kualitas sistem terhadap efektivitas implementasi SIPD di Kabupaten Sampang. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam melakukan evaluasi dan mengambil keputusan dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi SIPD. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki mekanisme bimbingan teknis guna memperkuat kompetensi pengguna, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia sesuai tingkat pendidikan, serta memperkuat kualitas sistem.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut.

1. Apakah kompetensi pengguna berpengaruh terhadap efektivitas implementasi SIPD di Kabupaten Sampang?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi SIPD di Kabupaten Sampang?
3. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap efektivitas implementasi SIPD di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh kompetensi pengguna terhadap efektivitas implementasi SIPD di Kabupaten Sampang.
2. Menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap efektivitas implementasi SIPD di Kabupaten Sampang.
3. Menguji pengaruh kualitas sistem terhadap efektivitas implementasi SIPD di Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai adopsi teknologi di sektor publik, khususnya dalam konteks implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selain itu, penelitian ini

berkontribusi pada pengembangan model empiris yang menjelaskan hubungan antara kompetensi pengguna, tingkat pendidikan, kualitas sistem, dan efektivitas implementasi SIPD. Penelitian ini juga memperkuat landasan teoretis dengan mengintegrasikan *Human Capital Theory* untuk menjelaskan peran kompetensi dan pendidikan pengguna, serta *DeLone & McLean Information System Success Model* untuk memahami bagaimana kualitas sistem memengaruhi keberhasilan implementasi SIPD. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian kuantitatif selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor keberhasilan sistem informasi di sektor publik.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang, penelitian ini dapat dijadikan dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelatihan dan bimbingan teknis guna memperkuat kompetensi operator SIPD. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas sistem dan infrastruktur guna meminimalkan hambatan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik dalam pengembangan studi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi SIPD, khususnya dalam mengkaji keterkaitan antara kompetensi pengguna, tingkat pendidikan, dan kualitas sistem terhadap keberhasilan penerapan SIPD.